

# 2025

Minggu ke-2 September  
(8 s.d. 14 September 2025)

# Isu Sepekan

Bidang Ekkuinbang, Komisi IV



**BADAN KEAHLIAN**  
**DPR RI**

Bridging research to parliament  
Evidence based policy making

## AKSELERASI PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH (KNMP)

**Firyal Nabihah**

Analis Legislatif Ahli Pertama  
[firyal.nabihah@dpr.go.id](mailto:firyal.nabihah@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Masyarakat pesisir Indonesia menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kesejahteraan. Ketergantungan pada perikanan tangkap membuat pendapatan mereka sangat bergantung pada cuaca dan musim. Pada musim paceklik, penghasilan nelayan bisa turun hingga 40 persen, sementara rata-rata satu keluarga nelayan memiliki 4–5 tanggungan. Keadaan ini diperparah oleh keterbatasan akses ke pasar, stasiun bahan bakar minyak, dan sarana distribusi, yang menyebabkan biaya logistik meningkat. Rendahnya pendidikan dan keterampilan membuat nelayan sulit beralih ke sektor lain atau meningkatkan daya saing usahanya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembangunan kampung nelayan yang dapat mengatasi persoalan struktural dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Kampung nelayan sendiri merupakan permukiman yang dihuni oleh masyarakat yang bekerja di bidang perikanan laut, dengan struktur sosial yang biasanya terdiri atas juragan dan nelayan kecil. Permukiman kampung nelayan umumnya masih kurang memadai, dengan akses air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Pola kehidupan mereka sangat dipengaruhi musim dan kondisi ekonomi sehingga rentan terhadap fluktuasi harga ikan dan krisis pangan. Oleh karena itu, upaya pembangunan kampung nelayan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan infrastruktur, sosial-ekonomi, dan pemberdayaan komunitas agar tercipta kemandirian dan keberlanjutan.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan agar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, segera mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program yang termasuk prioritas utama Presiden ini diminta untuk segera direalisasikan. Instruksi tersebut disampaikan Wakil Presiden usai panen budi daya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut, Batam, pada 10 September 2025. Wakil Presiden menekankan bahwa percepatan pembangunan KNMP penting untuk mengoptimalkan potensi kelautan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara kementerian, lembaga, dan masyarakat agar program dapat berjalan maksimal.

Program KNMP menawarkan solusi terintegrasi melalui lima langkah strategis. *Pertama*, pembangunan infrastruktur fisik berupa rumah layak huni, *cold storage*, fasilitas pengolahan ikan, dan pasar ikan. *Kedua*, penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan sekolah. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi melalui diversifikasi usaha perikanan, pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah, serta skema kredit berbunga rendah. *Keempat*, pelatihan nelayan dalam literasi keuangan, manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. *Kelima*, pembentukan kelembagaan berbasis komunitas yang mampu mengelola fasilitas dan menjaga keberlanjutan program.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 sebagai langkah awal, dan total 1.100 kampung hingga 2027. Saat ini sudah ada 910 proposal dari berbagai daerah yang sedang diseleksi secara ketat. Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua, menjadi contoh keberhasilan

# 2025

Minggu ke-2 September  
(8 s.d. 14 September 2025)

## Isu Sepekan

Bidang EKKUINBANG, Komisi IV

dengan pendapatan nelayan naik 60 persen setelah proses modernisasi. Melalui KNMP, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan lebih dari 2 juta masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian maritim nasional.

### Atensi DPR

Program KNMP menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komisi IV DPR RI dapat mendorong penyusunan atau penyesuaian regulasi yang mendukung pembangunan kampung nelayan, termasuk pelindungan ruang pesisir, yaitu dengan menyinkronkan kebijakan tersebut dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI memastikan kecukupan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk KKP dalam merealisasikan target 100 kampung pada 2025 dan 1.100 kampung hingga 2027. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI diharapkan melakukan monitoring capaian indikator kinerja KKP, menilai transparansi penyaluran anggaran, dan mengidentifikasi hambatan di lapangan melalui kunjungan kerja serta rapat dengar pendapat. Langkah-langkah ini memastikan KNMP berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan lebih dari 2 juta masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ekonomi maritim nasional.

### Sumber

antaranews.com, 11 September 2025;  
bisnis.com, 10 September 2025;  
kontan.co.id, 10 September 2025;  
merdeka.com, 12 September 2025;  
tempo.co, 10 September 2025.

# Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R  
Anugrah Juwita S

Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making